

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud prevention* pada instansi pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut di antaranya: Kebijakan Transaksi Non Tunai, Budaya Organisasi, SPIP, Moralitas Aparatur, Kompetensi Aparatur dan Sistem Reward and Punishment. Data utama dikumpulkan melalui kuesioner online yang ditanggapi oleh 136 karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi XXX. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Model (PLS SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Transaksi Non Tunai, Budaya Organisasi, SPIP, Moralitas Aparatur, Kompetensi Aparatur dan Sistem Reward and Punishment berpengaruh signifikan dan positif terhadap *fraud prevention* di Instansi tersebut. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa untuk mengurangi resiko terjadinya kecurangan pegawai, instansi pemerintah daerah perlu melakukan upaya pencegahan terjadinya kecurangan dengan menerapkan Transaksi Non Tunai pada keuangan pemerintah daerah, menerapkan budaya organisasi yang baik, pengendalian yang baik dengan memperketat pengawasan menggunakan CCTV dan audit secara berkala, mendidik aparatur agar memiliki akhlak yang baik, meningkatkan kompetensi aparatur yang diimbangi dengan etika dan moral, serta menerapkan Sistem Reward and Punishment yang ketat di kantor. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah literatur tentang studi *fraud* dengan menggunakan data primer yang masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia.

Kata Kunci: (*fraud prevention*, sektor pemerintahan, budaya organisasi, kebijakan TNT Indonesia)